

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Atmasasmita Romli, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Burght, Prof DR. Gr. Van Der, *Buku Tentang Perikatan Berisi Teori dan Yurisprudensi Nderland (Setelah Perang Dunia Ke II)*, Bandung : PT. Alumni, 2012.
- Fachrudiin, Irfan, *Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Peradilan Nomor 122.
- Gautama, Sudargo, *Indonesian Business Law*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*,
- _____, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 2010.
- Hasan, Djuhaendah. Dr., *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2014.
- _____, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hernoko Agus Yudho, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Johan Nasution Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2014.

Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

Kansil, C.S.T & Christine S.T. Jansil, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Hak-Hak Tanggungan Atas Tanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; 1997.

Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung: Nusa Media, 2013.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

_____, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik : Sikap yang harus diambil Pengadilan*, Yogyakarta : FH UII Press, 2015.

_____, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Magnis Suseno Frans, *Etika Dasar (Masalah-Masalah pokok filsafat Moral)*, Yogyakarta : Kanisius, 1987.

_____, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum)*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Marbun SF, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1997.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT Dilengkapi dengan UUPA, UUHT, Peraturan Tentang Jabatan PPAT, BPHTB, PPh, Pendaftaran Tanah Masa Berlaku SKMHT untuk Kredit-Kredit Tertentu, Laporan Bulanan PPAT, Blanko-Blanko Akta PPAT dan Pedoman Pengisiannya Edisi Revisi*, contoh Akta PPAT berdasarkan Perkabab nomor 8 Tahun 2012, Yogyakarta; Karya Media, 2012.

Natsir Asnawi, M, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, Yogyakarta : FH UII Press, 2013.

- Organisasi Perburuhan Internasional, *Modul Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Perundang-Undangan yang ada, Standar Internasional & Praktek Terbaik*, Jakarta : Kantor Perburuhan Nasional.
- Panggabean Henry P, *Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan baru untuk pembatalan perjanjian (Berbagai perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta : Liberty, 2001.
- Panggabean Henry P, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Alumni, 2012.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Retnowulan & Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1995.
- Rusli Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Remi Sjahdeini Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Safaat Ali & Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : @Konpress, 2014.
- Santoso Djohari & Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit & Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983.
- Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Soepomo R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (cetakan keenam belas)*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2011.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty, 2005.

- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setra Press, 2013.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Supramono Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2000, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Jurnal dan Penelitian

- I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum : Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996.
- Lukman, *Akibat Hukum Pembatalan dan Degradasi Akta Notaris oleh Pengadilan*, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011.
- Aries Wijaya, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Perjanjian*, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.
- Muhammad Arifin, "Penyalahgunaan Keadaan sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2011.
- R.A. Asriningrum Kusumawardhani, *Pembatalan perjanjian oleh hakim akibat adanya penyalahgunaan keadaan/Misbruik Van Omstandigheden atau Undue Influence : analisis kasus Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3641K/PDT/2001 dan Putusan*

Mahkamah Agung RI nomor 2356K/PDT/2008, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2013.

Samuel Bonar Christian Sianipar, Penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/PDT/2008 dan Nomor 3091 K/PDT/ 2010), *Tesis*, Universitas Indonesia, 2014.

I Wayan Suariga, Sarjana Hukum, “Pembatalan Kontrak berdasarkan Unsur Penyalahgunaan Keadaan”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali, 2015.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Frequently Asked Questions (Faq) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/Pojk.03/2014 tertanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu.